

SHELTER COVID-19 UII DIRESMIKAN

Seminggu, Sleman Tambah 1.000 Kasus



KR-Fadmi Sustiwi

Rektor UII menjelaskan kepada Sekda Sleman kondisi kamar.

SLEMAN (KR) - Dalam satu minggu terakhir ini, perkembangan kasus Covid-19 di Sleman mengalami lonjakan luar biasa, terdapat lebih dari 700 kasus baru. Bahkan kalau ditambah dengan klaster baru, terdapat penambahan sekitar 1.000 kasus dalam seminggu ini.

Kepala Dinas Kesehatan Joko Hastaryo mengemukakan hal tersebut dalam penjelasan media usai peresmian Shelter Covid-19 UII di kampus Jl Kaliurang KM 14,5, Senin (14/6). Narasumber lain Sekda Sleman Harda Kiswaya, Rektor UII Fathul Wahid, Inisiator Gerakan Sonjo Rimawan Pradipto dan ketua panitia Nur Aisyah Jamil.

Joko menyebutkan, lonjakan di Sleman sekarang cukup tinggi. Bahkan shelter lain yang dikelola di Rusunawa Gemawang sudah *overflow*. Karena dengan kapasitas 72 terisi 75 orang. Sementara untuk shelter Asrama Haji saat ini terisi 65%. "Kehadiran shelter UII ini sebagai antisipasi juga. Jika warga dari utara bisa dibawa ke sini, tidak harus ke selatan," ujarnya.

Melihat kasus Covid-19 yang angkanya terus naik, menurut Joko, Bupati Sleman telah mengeluarkan Instruksi Bupati no

14 tentang keharusan Kelurahan memiliki shelter. Kelak setiap kelurahan memiliki shelter, karena persyaratan membuat shelter yang sebenarnya tidak gampang. "Harus ada kamar dengan kamar mandi sendiri," jelasnya.

Sementara Rektor UII Fathul Wahid menjelaskan, Shelter Covid-19 yang mulai dibuka Selasa (15/5) menampung Rusunawa Selatan dengan kapasitas 72 kamar. Rusunawa diresmikan 31 Agustus 2007 oleh Menpera M Yusuf Asy'ari selama semester ganjil digunakan untuk pesantren mahasiswa baru dan semester genap untuk pesantren mahasiswa yang hendak mengikuti KKN.

"Selain membantu penanganan pandemi Covid-19, pembukaan shelter ini sebagai ikhtiar mitigasi risiko persiapan pembelajaran luring terbatas yang direncanakan mulai semester depan. Meski demikian, kami berharap shelter ini tidak pernah digunakan masyarakat," ujarnya.

Sekda Harda Kiswaya menambahkan, pengguna shelter ini tidak dipungut biaya alias gratis. Semua biaya dari UII dan APBD Sleman. Namun hal itu tidak lepas dari donasi dan bantuan Sonjo. (Fsy) -f

MAN 1 Kulonprogo Realisasikan ZI

PENGASIH (KR) -Menindaklanjuti program Wilayah Bebas dari Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) madrasah, Subbag Orjala dan KUB Kanwil Kemenag DIY melakukan pendampingan pembinaan Zona Integritas (ZI) Tahun 2021 di MAN 1 Kulonprogo.

Pendampingan pembinaan ZI ini merupakan tahapan menyiapkan MAN 1 Kulonprogo menjadi madrasah yang berzona Integritas, memenuhi kualifikasi WBK kemudian selanjutnya WBBM. "Pentingnya ZI di madrasah, yang merupakan tonggak awal perubahan khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan layanan publik," kata Kepala MAN 1 Kulonprogo, Edi Triyanto SAg SPd MPd, Senin (14/6).

Pendampingan pembinaan ZI dilak-

sanakan di Ruang Ava dengan narasumber Dini Meiyanti SE MSi Analisis Kebijakan Subbag Orjala dan KUB Kanwil Kemenag DIY. Bersama Tim ZI MAN 1 Kulonprogo menganalisis apa itu ZI pada Kementerian Agama, syarat-syarat beserta evident yang dibutuhkan.

Dini Meiyanti menyampaikan kesiapan madrasah dalam mewujudkan ZI mencapai WBK/ WBBM ini. iSaya telah mendampingi 3 madrasah sebelumnya untuk piloting project ZI dan hasilnya, saya menyimpulkan bahwa madrasah lebih siap mewujudkan WBK/ WBBM ini," ujar Dini sambil menambahkan kesiapan tersebut ditunjukkan dengan adanya Tim Kerja yang solid dan memiliki tujuan bersama untuk mewujudkan ZI. (Wid)-f

HADAPI GELOMBANG PARANGTRITIS

SAR Bekerja Ekstra Ketat



KR-Sukro Riyadi

Pekerja beraktivitas di proyek pembangunan posko SAR Parangtritis.

BANTUL (KR) - Gelombang Pantai Parangtritis Kapanewon Kretek dinilai paling ganas dibanding lokasi lain di selatan Bantul. Sehingga penjagaan ekstra ketat harus diterapkan personel SAR mencegah hal-hal tidak diinginkan menimpa wisatawan. Dibangunnya pos komando SAR di Parangtritis merupakan wujud komitmen Pemda DIY memberikan pelayanan terbaik bagi wisatawan.

"Pos komando yang sedang dibangun sangat mendukung terhadap kelancaran teman-teman SAR dalam melaksanakan tugas pengamanan," ujar Komandan SAR Korwil 3 Ali Sutanta Jaka Saputra, Senin (14/6).

Ali mengatakan, posko lama sudah berusia hampir 25 tahun. Kondisi bangunan tidak sebanding dengan jumlah personel. Oleh karena pihaknya mengajukan ke Satpol PP DIY untuk dibuatkan Posko SAR di Parangtritis. "Sekarang masih proses pembangunan Posko SAR berlantai dua ini," ujarnya.

Bangunan baru tersebut diyakini bakal memberikan dampak positif terhadap spirit SAR. Nantinya semua sarana dan prasarana bisa dijadikan satu di posko terbaru.

Ali juga sudah mengajukan permintaan prasarana kepada Pemkab Bantul untuk melengkapi kekurangan di lapangan. Selain itu juga sudah koordinasi dengan pengawas, pelaksana dan pemborong agar pembangunan posko material sesuai aspek yang ditentukan. Bahkan pihaknya setiap hari juga ikut memantau proses pembangunan. "Sesuai perintah Pak Kasat Pol PP DIY, Pak Noviar, jika ada kekurangan segera diminta melapor," jelasnya.

Pembangunan Posko SAR Parangtritis tidak boleh main-main. Struktur harus benar-benar kuat mengingat bangunan tersebut di tepi pantai dan juga berada di lahan berpasir. (Roy) -f

MINTA AWAK ANGKUTAN SEGERA DI VAKSINASI

Organda DIY Minta Keringanan Pajak Kendaraan

YOGYA (KR) - Pelaku bisnis transportasi darat yang tergabung dalam Organda DIY meminta keringanan berupa penghapusan atau pemotongan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di masa pandemi Covid-19. Sebab kondisi pelaku bisnis transportasi darat sangat terpuruk akibat pandemi sehingga dikhawatirkan banyak yang tidak mampu bertahan alias gulung tikar jika tidak ada keberpihakan dari pemerintah.

Ketua DPD Organda DIY V Hantoro mengungkapkan, kondisi perusahaan angkutan darat belum pulih akibat pandemi sehingga pihaknya berharap ada penghapusan ataupun pemotongan pajak kendaraan. Bahkan angkutan pariwisata sangat terdampak tidak bisa bekerja dengan berbagai kebijakan pengendalian hingga pelarangan mudik Lebaran pada 2021.

"Pemerintah setidaknya memberikan keringanan bagi kami yang belum mendapatkan stimulus dari pemerintah sejak awal hingga pademi ini. Harapan kami bisa mulai bekerja lagi setelah Juni 2021 ini, jika memang Pemerintah tidak mengeluarkan aturan yang berkaitan dengan larangan mobilisasi," ujar Hantoro kepada KR di Yogyakarta, Senin (14/6).

Menurutnya Organda DIY sangat menunggu karena membutuhkan stimulus dari pemerintah secepatnya agar bisa bangkit beroperasi kembali bekerja. Organda DIY belum mendapatkan keringanan atau stimulus sehingga sangat berharap ada penghapusan PKB ke depan. Pemda DIY sudah menyampaikan baru bisa memberikan keringanan berupa penghapusan denda sama sekali dari pemerintah.

"Jika keringanan tersebut dapat digulirkan berupa penghapusan PKB, anggota kami tentunya akan menertibkan administrasinya. Soalnya untuk menertibkan administrasi saja, kami sulit bergerak saat ini," tandasnya.

Wakil Ketua Umum Kadin DIY Bidang Transportasi ini juga sangat berharap agar seluruh awak angkutan darat di DIY bisa diberikan vaksinasi Covid-19 secepat mungkin agar segera melayani masyarakat. Organda DIY juga sudah mengajukan surat permohonan kepada Dinas Kesehatan DIY agar dapat memberikan vaksinasi kepada awak angkutan sekitar 5.500-an orang.

"Jika seluruh awak angkutan darat di DIY sudah divaksin akan timbul kepercayaan diri dan memberikan rasa aman. Untuk itu, kami berharap vaksinasi kepada awak angkutan ini bisa segera dilaksanakan dan diprioritaskan," imbuh Hantoro. (Ira)-f

GEDUNG DEWAN BISA UNTUK VAKSINASI MASSAL

Pansus Covid-19 Minta Satgas Tak Lengah

YOGYA (KR) - Pansus Covid-19 DPRD Kota Yogya mendukung upaya vaksinasi massal yang digencarkan masyarakat. Bahkan gedung dewan juga dipersilakan untuk dijadikan lokasi vaksinasi massal.

Ketua Pansus Covid-19 DPRD Kota Yogya Antonius Fokki Ardiyanto menyebut, masyarakat saat ini memiliki keinginan kuat untuk segera divaksin. "Meski sudah reguler digelar di sejumlah fasilitas layanan kesehatan namun vaksinasi massal harus bisa terus digelar. Silakan gunakan gedung dewan," sebutnya, Senin (14/6).

Fokki berharap semakin sering vaksinasi massal, capaian kekebalan kelompok dapat segera terealisasi. Warga yang sudah divaksin hingga dua kali penyuntikan juga terbukti memiliki daya tahan tubuh yang lebih baik. Kalau pun terpapar virus, tingkat keparahannya pun dapat ditekan semaksimal mungkin. Oleh karena itu ketersediaan vaksin baik Sinovac maupun AstraZeneca diharapkan dapat terus terjaga.

"Pihak rumah sakit baik swasta maupun pemerintah turut mendukung upaya vaksinasi massal tersebut. Terutama dengan menerjunkan petugasnya guna membantu kelancaran program. Semakin cepat memang semakin bagus. Tentu ini butuh keterlibatan semua pihak. Kami di dewan siap mendukung," ungkapnya.

Di samping itu, dinamika perkembangan kasus saat ini juga tidak boleh disepelekan. Pansus meminta Satgas Penanganan Covid-19 yang ada di tingkat mikro hingga kota agar tidak lengah. Antisipasi tersebut salah satunya kesiapan rumah sakit maupun shelter untuk menangani kasus baru. "Bukan tidak mungkin, meski ketersediaan kamar perawatan khusus Covid-19 di Kota Yogya masih luang, namun limpahan dari daerah lain juga terus berdatangan. Pertolongan harus cepat guna meminimalisasi tingkat mortalitas kasus," katanya.

Fokki juga mengusulkan agar warga yang meninggal akibat Covid-19 dapat diusulkan sebagai penerima santunan kematian. Hal ini karena korban Covid-19

sudah mengalami kerugian materi serta biaya bedah bumi yang cukup tinggi. "Santunan kematian bisa dialokasikan karena kondisi darurat. Apalagi Silpa APBD Kota Yogya 2020 mencapai di atas Rp 300 miliar. Jadi saya kira anggaran pemerintah cukup mampu," usulnya.

Sementara Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Kota Yogya Heroe Poerwadi mengaku sudah

menyiapkan berbagai strategi dalam menghadapi tren lonjakan kasus akhir-akhir ini. Namun, upaya pencegahan dan pengendalian juga tidak luput jadi prioritas. "Warga yang memiliki gejala seperti demam dan sesak nafas harus segera memeriksakan diri. Setiap temuan kasus pun selalu ditindaklanjuti dengan skrining dan blocking yang ketat," tegasnya. (Dhi)-f

SOSIALISASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DP3AP2 Buka Layanan Konsultasi dan Aduan



Arif Nasiruddin SPsi MA menyampaikan paparan.

KR-Deady EW

WONOSARI (KR) - Kasi Data Informasi Gender dan Kerjasama Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY Arif Nasiruddin SPsi MA mengungkapkan, terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak disebabkan banyak hal. Salah satunya berkaitan dengan gender, dimana tidak ada pemahaman kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sehingga muncul kesenjangan dan terkesan perempuan lemah dan laki-laki melakukan kekerasan.

"Dinas sudah memiliki layanan perlindungan perempuan anak. Baik untuk pencegahan maupun penanganan," kata Arif Nasirudin di acara Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Logandeng, Playen, Senin (14/6).

Kegiatan yang diselenggarakan DP3AP2 dihadiri Anggota DPRD DIY Imam Taufik, Sekdes Logandeng Betti Iriyani, Dimas Ariyanto dari LSM dan peserta sosialisasi. Diungkapkan, layanan bisa diakses melalui Telepon Sahabat Anak dan Keluarga (TesSaGa) DIY (0274) 565003. Selain itu juga terdapat Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 'Reko Dyah Utami'. "Masyarakat dapat mengakses

layanan DP3AP2, dalam pencegahan maupun penanganan kekerasan perempuan dan anak," imbuhnya.

Anggota DPRD DIY Imam Taufik mengungkapkan, mendukung program sosialisasi DP3AP2. Melalui sosialisasi langsung ke masyarakat, maka dapat mengetahui berbagai hal baik regulasi maupun kemana harus melapor. Termasuk upaya dalam mendukung pencegahan maupun penanganan kekerasan perempuan dan anak. "Sosialisasi ini perlu untuk dilanjutkan, sebagai upaya pencegahan kekerasan perempuan dan anak," jelasnya. (Ded)

PENGUMUMAN LELANG

Nomor : 764/UNI/DAS.2.1/SAR/PL/2021
Universitas Gadjah Mada dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta akan melelang no.eksekusi wajib selain Barang Milik Negara tampa kehadiran peserta lelang melalui Aplikasi Lelang e-Auction dengan penawaran secara Closed Bidding yang dapat dilihat di website www.lelang.go.id terhadap Barang Milik Universitas (BMU) sebagai berikut:

A. Pelaksanaan Lelang pada :
Hari, Tanggal : Selasa, 29 Juni 2021
Batas Akhir Penawaran : Pukul 11.00 Waktu Server e-Auction (Waktu Indonesia Barat)
Alamat Domain : <https://www.lelang.go.id>
Tempat lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta.
Kantor Kusumanegara No. 11 Yogyakarta
: setelah batas akhir penawaran

Penetapan Pemenang : setelah batas akhir penawaran

B. Jenis Barang Milik Universitas (BMU) yang dilelang :
1 (satu) paket bangunan Rumah Dinas Blok J-2, J-3, J-6, J-7 di Bulaksumur UGM, dilelang dengan harga limit Rp93.042.000,00, uang jaminan lelang Rp40.000.000,00.

C. Lokasi BMU yang akan dilelang :
Bangunan Rumah Dinas Blok J-2, J-3, J-6, J-7 di Bulaksumur UGM.

D. Jadwal melihat BMU yang akan dilelang :
Mulai tanggal 15 Juni s.d 28 Juni 2021 pada Hari Kerja, pukul 09.00 s.d. 12.00 WIB.

E. Persyaratan mengikuti Lelang :
1. Cara penawaran lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui surat elektronik (Email) yang diakses pada sistem Domain <https://www.lelang.go.id>.
2. Pendaftaran calon peserta lelang dapat secara perorangan ataupun Badan Usaha. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dengan pengaktifan Akun pada Aplikasi Lelang (bukan ekstensi alamat Domain angka 1 dengan merekam dan mengunggah *softcopy scan*) KTP, NPWP (Pendaftaran File.jpg atau.png) dan nomor rekening atas nama sendiri (uang jaminan akan dikembalikan langsung ke nomor tersebut).
3. Uang Jaminan Lelang
Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Jumlah atau nominal yang disetorkan harus sama dengan besaran uang jaminan lelang yang disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang dan disetor sekaligus (bukan dilangsung).
b. Setoran uang jaminan lelang harus sudah efektif diterima KPKNL Yogyakarta selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
c. Uang jaminan lelang disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor Virtual Account (VA) akan dikirim secara otomatis dari alamat Domain di atas kepada Account masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan Valid/sah.
4. Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang pembeli sebesar 2% melalui nomor Virtual Account (VA) pemenang lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan di atas, uang jaminan lelang akan disetorkan ke Kas Negara.
5. Obyek lelang dilelang dalam keadaan apa adanya dengan segala konsekuensi biaya tertanggung atas obyek lelang. Peserta lelang dianggap telah mengetahui/memahami kondisi obyek lelang dan bertanggung jawab atas obyek lelang yang dibelinya.

F. Ketentuan pelaksanaan pekerjaan pembongkaran, pengambilan dan pengangkutan BMU sebagai berikut :
1. sebelum melaksanakan pekerjaan pemenang wajib menyerahkan uang jaminan pembongkaran, pengambilan, dan pengangkutan BMU sebesar Rp 20.000.000,00 dan akan dikembalikan penuh setelah selesai sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UGM;
2. memperhatikan surat edaran Rektor UGM nomor 1683/UNI.P/HKL/TR/2020 tentang Pembatasan maksimal kegiatan di Kampus Universitas Gadjah Mada, maka pelaksanaan pekerjaan harus melaksanakan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penularan covid-19;
3. jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini selama 45 hari kerja, mulai pukul:09:00 WIB sampai dengan pukul:16:00 WIB., terhitung sejak tanggal pemenang melakukan pelunasan dan dikeluarkannya Surat Perintah pembongkaran, pengambilan, dan pengangkutan BMU berupa bangunan Rumah Dinas Blok J-2, J-3, J-6, J-7 di Bulaksumur UGM oleh Panitia;
4. keterlambatan waktu pekerjaan ini akan dikenakan denda per hari 1/0/00 (satu permil) dari nilai penawaran lelang, maksimal 5 % (lima persen);
5. nilai tidak dapat menyelesaikan pembongkaran, pengambilan, dan pengangkutan secara fisik sampai batas waktu yang telah ditetapkan, maka Panitia akan menggunakan pihak lain untuk menyelesaikan pekerjaan pembongkaran dengan biaya dari pemenang (jaminan pembongkaran) dan panitia tidak bertanggungjawab atas BMU tersebut;
6. uang jaminan pembongkaran akan dikembalikan, jika pekerjaan sudah selesai dengan menunjukkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dari Panitia Pengawas (dari Direktorat Aset UGM);
7. BMU telah diberi tanda oleh Panitia dan dilarang keras mengambil barang yang tidak masuk dalam daftar lelang;
8. pengalangan pondasi menyesuaikan dengan kedalaman fondasi bangunan dan tidak diperkenankan mengangkut tanah;
9. pelaksanaan pekerjaan harus menjaga keamanan, kebersihan, keutuhan jalan, halaman, dan prasarana di lingkungan lainnya pada kompleks yang bersangkutan serta jalur jalan masuk dan jalan keluar ke lingkungan UGM. Akibat dari kelalaian dan kerusakan menjadi tanggung jawab pemenang lelang;
10. pelaksanaan pekerjaan harus mematuhi prinsip-prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
11. guna menjaga keselamatan, keamanan umum (tenaga kerja dan orang lain) dan lingkungan, maka pemenang harus:
- menjaga keutuhan tanaman dan pohon (vegetasi) yang berada di sekitar bangunan obyek lelang, jika dampak pelaksanaan pembongkaran, pengambilan dan pengangkutan BMU merusak tanaman dan pohon (vegetasi), maka pemenang lelang harus mengganti 3 kali dengan tanaman dan pohon dengan jenis yang sama atau dituangkan oleh UGM;
- mengantisipasi polusi debu pada saat pelaksanaan pembongkaran, pengambilan dan pengangkutan dengan penyiraman;
- melakukan pengamanan disekitar bangunan tersebut dengan memberikan tanda batas pengamanan (police line) atau dengan pagar pembatas/seng, dan sebagainya;
- meminimalisir resiko getaran/dentuman akibat jatuhnya bongkaran bangunan dan tetap berada di area dalam pagar pengamanan;
12. tenaga kerja yang diizinkan menginap di area pembongkaran, hanya tenaga yang bertugas menjaga keamanan peralatan, alat berat dan barang bongkaran tersebut maksimal 2 atau 3 orang;
13. tenaga yang menginap wajib menyerahkan fotokopi KTP/Identitas kepada Satuan Keamanan/PKAL atau Panitia Pengawas;
14. harus berusaha mengamankan barang maupun komponen lainnya yang tidak dilelang yang berada di lokasi bangunan yang dilelang, agar tetap dalam kondisi baik, dalam kuantitas maupun kualitasnya. Kelalaian dalam hal ini menjadi tanggung jawab pemenang yang akan diperhitungkan dengan jaminan pengambilan barang;
15. pelaksanaan pekerjaan harus memperhatikan keselamatan, kesehatan, dan lingkungan yang ada di lingkungan sekitar;
16. semua barang yang tidak dilelang baik berharga maupun tidak berharga menjadi tanggung jawab pemenang, karena itu harus segera diangkat ke luar lokasi;
17. pelaksanaan pekerjaan dinyatakan selesai secara fisik apabila telah bekas bangunan yang dibongkar sudah berupa hamparan tanah yang ketinggiannya setara dengan ketinggian tanah disekitarnya dan sudah bersih dari sisa-sisa bangunan yang dilelang;
18. untuk penanganan covid-19, pemenang harus mematuhi peraturan sebagai berikut:
- menyediakan *hand sanitizer* dan alat cuci (dan sabun) untuk para tenaga kerja;
- menyediakan *thermometer gun*, masker dan sarung tangan untuk para tenaga kerja;
- memberikan vitamin dan asupan makan yang bergizi untuk para tenaga kerja;
- tidak memperbolehkan tenaga kerja yang sakit (ODP dan PDP covid-19);
- secara periodik wajib menyemprotkan desinfektan pada area bangunan yang dibongkar;
- melakukan pemeriksaan dengan *thermometer gun* untuk tenaga kerja yang memasuki area bangunan yang dibongkar;
19. untuk pencegahan penularan covid-19, maka tenaga kerja harus mematuhi peraturan sebagai berikut:
- menggunakan alat pengaman diri: masker dan sarung tangan;
- menjaga jarak aman dengan antar pekerja;
- mencuci tangan sebelum dan sesudah bekerja dan makan pagi/siang;
- Selatannya lebih lanjut dapat menghubungi Kantor Direktorat Aset UGM Lantai 2 Sayap Selatan Kantor Pusat UGM. Yogyakarta, 15 Juni 2021
td
Panitia Lelang